



## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan APBN: Penyerapan Anggaran, Pendapatan Pajak dan Kebijakan Fiskal

Cris Kuntadi<sup>1\*</sup>, Galih Anggriawan<sup>2</sup>, Didi Suryadi<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, [cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id)

<sup>2)</sup> Politeknik STIA LAN Jakarta, email: [galihakla10@gmail.com](mailto:galihakla10@gmail.com)

<sup>3)</sup> Politeknik STIA LAN Jakarta, email: [didi.suryadi@pom.go.id](mailto:didi.suryadi@pom.go.id)

\*Corresponding Author: Cris Kuntadi<sup>1</sup>

**Abstrak:** Artikel ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan APBN pada pemerintah pusat sebagai variabel terikat. Variabel penyerapan anggaran, pendapatan pajak dan kebijakan fiskal sebagai variabel bebas yang mempengaruhinya. Kajian ini adalah *literature review* yang memaparkan adanya pengaruh penyerapan anggaran; pendapatan pajak; dan kebijakan fiskal terhadap perencanaan APBN, Artikel ini merupakan kajian dalam administrasi terapan untuk menambah literasi pengaruh diantara variabel untuk keperluan penelitian selanjutnya. Hasil *literature review* adalah penyerapan anggaran, pendapatan pajak dan kebijakan fiskal berpengaruh terhadap perencanaan APBN.

**Keyword:** Perencanaan APBN, Penyerapan Anggaran, Pendapatan Pajak, Kebijakan Fiskal

### PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun belakangan ini di dunia terdapat fenomena yang luar biasa, dimulai dengan adanya pandemi Covid-19 yang dihadapi seluruh negara mulai awal tahun 2020, dimana menyebabkan kondisi perekonomian semua negara sangat terdampak, pertumbuhan ekonomi yang hampir semua negatif serta inflasi yang tinggi. Semua negara diseluruh dunia sedang menghadapi ujian. Perekonomian dunia belum sepenuhnya pulih dan bangkit namun tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga terjadi krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi. Semua negara mulai mengetatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mereka untuk menghindari resesi, mulai dengan meningkatkan suku bunga dll. Dengan fenomena global tersebut membuat indonesia dalam menyusun APBN juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan *prudent* sehingga mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme dan mendukung pencapaian target pembangunan.

Dokumen APBN disusun atas *timeline* siklus penyusunan APBN. Siklus APBN adalah rangkaian kegiatan dalam proses APBN yang dimulai pada saat APBN mulai disusun sampai dengan APBN disahkan dengan undang-undang. Penyusunan APBN dimulai sejak tahapan perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran pendapatan dan belanja

negara dimulai dari tahap penyusunan asumsi dasar ekonomi makro, tema, arah kebijakan, sasaran dan prioritas pembangunan diakhiri dengan penyampaian RUU APBN beserta Nota Keuangannya ke DPR RI untuk dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR.

Siklus penyusunan APBN dimulai pada bulan Januari-Juli (T-1) dengan penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Terdapat asumsi-asumsi yang disusun oleh pemerintah untuk dipergunakan sebagai pondasi dalam ekonomi makro sebagai bahan pedoman dalam menyusun kapasitas fiskal oleh Pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negara dan kebijakan prioritas pengalokasian belanja pada bidang tertentu. Berdasarkan kapasitas fiskal kemudian disusunlah suatu perencanaan anggaran yang akan dipakai sebagai acuan belanja dan proyeksi pendapatan negara. Pada tahun 2022 kebijakan fiskal adalah ekspansif-konsolidasi, dengan strategi mengotimalkan pendapatan negara, mendorong penguatan belanja yang berkualitas dan mengotimalkan pembiayaan.

Komponen pendapatan negara ini berasal dari penerimaan sektor perpajakan maupun diluar sektor perpajakan. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan hal yang vital dan determinan dalam penyusunan APBN yaitu sebagai kontribusi terbesar dalam penerimaan suatu negara. Berdasarkan data Penerimaan BPS tahun 2020-2022, penerimaan pajak mendominasi dengan rata-rata 80% dari total penerimaan negara. Berdasarkan data dari Ditjen Pajak, penerimaan pajak mencatatkan neto penerimaan pajak sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 telah melebihi target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021. Data penerimaan negara mencatat bahwa sampai akhir desember 2021, jumlah neto penerimaan pajak sebesar Rp1.231,87 triliun atau 100,19% dari target penerimaan APBN Tahun Anggaran 2021 atau sebesar Rp1.229,6 triliun. Pada semester I tahun 2022 realisasi pendapatan negara pada Semester I 2022 telah mencapai angka Rp1.317,2 triliun atau sebesar 58,1 persen dari target yang ditetapkan pada Perpres 98/2022 yaitu sebesar Rp2.266,2 triliun (Menteri Keuangan, Juli 2022).

Melalui APBN, penerimaan pajak oleh negara dapat dialokasikan ke berbagai sektor kegiatan sesuai dengan tugas dan urusan pemerintahan. Perencanaan anggaran untuk mendanai kegiatan yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang menghasilkan kesepakatan kebijakan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Dua produk ini memuat berbagai informasi terkait prioritas pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi Presiden dan telah disetujui oleh DPR.

**Tabel 1. Alokasi Belanja Pemerintah Pusat Per Fungsi**

Fungsi APBN	Tabel Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi (Milyar Rupiah)		
	2020	2021	2022
Pelayanan umum	474,999.70	526,181.30	627,121.30
Pertahanan	131,246.40	137,185.60	134,645.40
Ketertiban dan keamanan	162,729.00	166,632.20	176,676.40
Ekonomi	406,175.40	511,338.10	399,963.60
Lingkungan hidup	18,360.60	16,689.90	14,109.20
Perumahan dan fasilitas umum	30,359.50	33,217.30	17,291.70
Kesehatan	61,148.30	111,666.70	139,502.10
Pariwisata dan budaya	5,056.70	5,261.40	3,725.70
Agama	10,090.80	11,075.80	10,598.60
Pendidikan	156,894.40	175,236.50	169,230.40
Perlindungan sosial	226,416.50	260,063.60	251,678.00

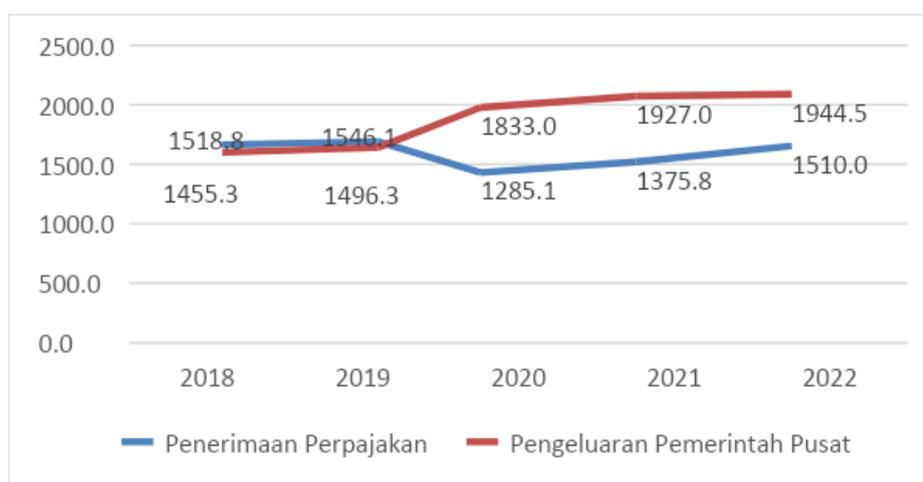
---

Jumlah	1,683,477.20	1,954,548.50	1,944,542.30
--------	--------------	--------------	--------------

---

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Realisasi RKP dalam rangka pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah dilakukan dengan melakukan aktivitas/kegiatan yang telah disusun perencanaan anggarannya. Pemerintah diminta efisien dan efektif dalam pengalokasian anggaran tersebut. Ini berarti ada yang harus ditekankan pada pengendalian strategis pengeluaran agregat dan penetapan prioritas; dan fasilitasi efisiensi dan efektivitas (Cris Kuntadi et al, 2022). yang lebih besar melalui pendelegasian wewenang manajemen dengan akuntabilitas untuk hasil Belanja pemerintah akan bermanfaat bagi masyarakat setelah diimplementasikan sehingga terjadi penyerapan/realisasi belanja dilaksanakan. Belanja negara ini mencakup belanja modal untuk infrastruktur, belanja untuk Pendidikan, maupun subsidi BBM dan BLT yang diterima masyarakat. Sebagai perwujudan *good governance* dan konsep *new public management*, pemerintah dituntut melayani masyarakat layaknya pelanggan walaupun tidak mencari keuntungan (profit).



Sumber: BPS, Kementerian Keuangan, diolah

**Gambar 1. Penerimaan Perpajakan dan Pengeluaran Pemerintah Pusat**

Sebelum memasuki tahapan perencanaan dan penganggaran, dilakukan proses evaluasi kinerja pembangunan dan kinerja anggaran serta kebijakan tahun sebelumnya dan tahun berjalan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional secara bersama-sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berjalan. Evaluasi tersebut meliputi kegiatan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya sebagai bahan rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran dan penyusunan pagu anggaran tahun berikutnya. Penyusunan evaluasi ini sangat penting untuk menjamin bahwa proses proses selanjutnya berjalan dengan mempertimbangkan hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

Implementasi belanja negara atas APBN dengan sumber penerimaan dalam konteks kebijakan fiskal tentu sangat berkaitan erat dengan perencanaan APBN itu sendiri. Penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja menuntut perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada hasil dan lebih terukur. Penganggaran berbasis kinerja (Performance Budgetting) merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai (C. Kuntadi et all, 2022). Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan belanja diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas (*Money Follow Program Prioritas*). Anggaran yang disusun dialokasikan lebih banyak ke program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah di

dalam RPJMN. Maksud dan tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengikuti kondisi perekonomian, terutama pada saat pandemi dan inflasi yang tak terhindarkan sehingga dalam mencapai sasaran dan target pembangunan diperlukan pengelolaan keuangan negara yang kredible, transparan dan akuntabel (*good governance*).

Berdasarkan latar belakang dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah penyerapan anggaran berpengaruh terhadap perencanaan APBN?
2. Apakah pendapatan pajak berpengaruh terhadap perencanaan APBN?
3. Apakah kebijakan fiskal berpengaruh terhadap perencanaan APBN?

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan di atas, tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penyerapan anggaran berpengaruh terhadap perencanaan APBN.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan pajak berpengaruh terhadap perencanaan APBN.
3. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan fiskal berpengaruh terhadap perencanaan APBN.

## KAJIAN PUSTAKA

Perencanaan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial Mardiasmo (2009). Perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, diantaranya mengenai kesesuaian dengan kebutuhan organisasi (prioritas), evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, kesesuaian aturan, ketepatan waktu (disiplin), partisipatif serta revisi (kesalahan administrasi) (Malahayati, C., Islahuddin & Basri, 2015).

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

Penyusunan APBN tidak terlepas dari penyusunan pagu indikatif yang merupakan batas tertinggi atas belanja kementerian/lembaga yang tidak dapat dilampaui dalam penentuan besarnya anggaran (Juwita Sari Winter, 2017). Dengan penetapan pagu indikatif dan pagu sementara pada tahap awal sebelum dimulai penganggaran secara rinci, para pelaku anggaran (Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah) harus menentukan kebijakan dan prioritas anggaran, termasuk keputusan mengenai "*trade-off*" antara keputusan yang telah diambil masa lalu dan yang akan diambil pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, akan tercipta proses penganggaran yang lebih strategis dan kredibel (penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah).

Proses perencanaan dan penganggaran APBN merupakan tahap pertama dalam rangkaian siklus APBN. Perencanaan dan penganggaran APBN dilakukan satu tahun sebelum tahun anggaran APBN dilaksanakan. Tahap perencanaan APBN merupakan fase awal sebelum proses penganggaran selanjutnya dilaksanakan. Dalam perencanaan APBN disusun arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, hingga ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Pagu Indikatif. Sedangkan proses penganggaran dimulai dari penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan Pagu Indikatif, hingga penyampaian Nota Keuangan, Rencana APBN, serta rancangan undang-undang APBN kepada DPR (Renosa Tosca Zamaro, 2018).

## Penyerapan Anggaran

Menurut Halim (2014) penyerapan adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari

anggaran). Penyerapan anggaran satuan kerja adalah proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran (Noviwijaya dan Rohman, 2013).

Kuncoro (2013) menyatakan penyerapan anggaran adalah salah satu dari beberapa tahapan dalam siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

Dalam organisasi sektor public, penyerapan anggaran juga dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu (Titin Delia et al, 2021). Atas dasar penjelasan penyerapan anggaran tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyerapan anggaran adalah realisasi anggaran/pembelanjaan anggaran dalam suatu periode. Penyerapan anggaran juga dapat dimaknai sebagai proporsi besaran anggaran yang telah dilakukan pencairan dalam satu tahun anggaran terhadap alokasi anggarannya.

### **Pendapatan Pajak**

Pengertian Pajak menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang KUP pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Ketentuan Umum Perpajakan, 2007).

Menurut Rahmat Soemitro Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional (Tulis Meliala dan Francisca Widiarti Oetomo, 2008). Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa, pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara, selanjutnya pungutan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Perencanaan program pembangunan yang terukur dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

### **Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal tersebut merupakan salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro yang memiliki peran penting dan strategis dalam mempengaruhi perekonomian, terutama dalam mencapai target-target pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Renosa Tosca Zamaro, 2018)

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makro ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat suatu perekonomian dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan ini dapat pula mempengaruhi sisi penawaran yang sifatnya lebih berjangka panjang, melalui peningkatan kapasitas perekonomian (Nurul Amin, 2019).

Kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat (Nopirin, Ph.D, 1997).

**Tabel 2: Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Author (tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	Juwita Sari Winter	Realisasi Anggaran berpengaruh signifikan	Variabel X merupakan realisasi anggaran.	Hanya meneliti pada belanja pemerintah pusat

No	Author (tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
	(2017)	terhadap penetapan Pagu Indikatif sebagai bagian dari perencanaan anggaran di K/L penyusunan pagu indikatif yang merupakan suatu proses yang menghasilkan surat bersama Menteri Keuangan dengan Kepala Bappenas tentang Pagu Indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP).	Variabel Y merupakan penetapan pagu indikatif yaitu tahapan dalam perencanaan APBN	saja yang merupakan bagian dari perencanaan APBN
2	Zamaro Renosa Tosca (2018)	Realisasi Belanja Pegawai dan Realisasi Belanja Barang, berpengaruh terhadap besarnya alokasi Pagu Indikatif	Variabel X merupakan realisasi belanja belanja. Variabel Y adalah alokasi pagu indikatif (tahapan perencanaan APBN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanya meneliti pada belanja pemerintah pusat saja yang merupakan bagian dari perencanaan APBN</li> <li>• Ada variabel X yang memengaruhi yaitu variabel alokasi anggaran belanja (satu tahun sebelum tahun anggaran APBN yang direncanakan)</li> </ul>
3	Hasna Azizah Syadza, Wahyuningty as Alya Gusnawati, Lintang Ardiningrum (2021)	Implementasi kebijakan fiskal terhadap APBN oleh pemerintah terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sama-sama meneliti implementasi kebijakan fiskal (X) terhadap perencanaan APBN (Y)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dilakukan pengujian</li> <li>• Ada variabel Y lain yang terdampak kebijakan fiskal yaitu pertumbuhan ekonomi</li> </ul>
4	Abdul Aziz (2013)	Kondisi <i>sustainable fiscal</i> akan terpenuhi jika Pemerintah dapat mendekatkan antara asumsi ekonomi makro terhadap APBN dengan realitas yang ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X adalah kebijakan fiskal</li> <li>• Variabel Y adalah APBN</li> </ul>	Tidak melakukan pengujian ( <i>literatur review</i> )
5	Muhammad Hamdan Sayadi (2020)	Realisasi Pendapatan Pajak tahun sebelumnya mempengaruhi perencanaan APBN dengan merubah target pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X adalah Realisasi Pendapatan Pajak</li> <li>• Variabel Y Perubahan Perencanaan APBN (melalui perpres)</li> </ul>	Variabel lain yang turut memengaruhi perencanaan APBN yaitu realisasi penerimaan PNPB
6	Lilis Susanti, (2016)	Pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja kategori tinggi untuk lebih berhati-hati (prudent) dalam menetapkan anggaran, sehingga proyeksi yang ditetapkan lebih akurat, tidak terlalu tinggi maupun rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salah satu variabel X adalah pertumbuhan pendapatan</li> <li>• Variabel Y Proses Penetapan APBN (Perencanaan)</li> </ul>	Variabel lain yang turut memengaruhi perencanaan APBN yaitu Pergantian Jabatan, Pertumbuhan Pendapatan, Pertumbuhan Belanja, Kompleksitas, Tipe Pemerintah, dan Ketepatan Waktu

No	Author (tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
7.	Jaka Sriyana (2009)	<i>A Causality Relationship Between Tax Revenue and Government Expenditure in Indonesia</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel x adalah penerimaan pajak</li> <li>• variabel Y adalah Belanja Pemerintah (APBN)</li> </ul>	
8.	Temel Gurdal, Mucahit Aydin, Veysel Inal (2020)	<i>The relationship between tax revenue, government expenditure, and economic growth in G7 countries: new evidence from time and frequency domain approaches</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel x adalah penerimaan pajak</li> <li>• Salah satu variabel Y adalah Belanja Pemerintah (APBN)</li> </ul>	Ada variabel Y lain yang ikut di uji yaitu pertumbuhan ekonomi

\*Ket variabel: Y=Perencanaan APBN; X<sup>1</sup>= Penyerapan Anggaran; X<sup>2</sup>= Pendapatan Pajak; dan X<sup>3</sup>= Kebijakan Fiskal.

## METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan kajian pustaka (*Library Research*). Metode ini dilakukan dengan mengkaji teori serta hubungan atau pengaruh diantara variabel yang bersumber dari buku-buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari *Mendeley*, *Scholar Google* dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review* ini adalah:

### 1. Pengaruh Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan APBN.

Penyerapan Anggaran berpengaruh terhadap Perencanaan APBN, berdasarkan penelitian sebelumnya yang menggunakan model realisasi anggaran dengan metode kuantitatif, untuk menentukan besaran belanja operasional dalam APBN, berdasarkan uji T, variabel-variabel angka realisasi dua tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan, yaitu Realisasi Belanja Pegawai (RBP) dan Realisasi Belanja Barang (RBB), berpengaruh terhadap alokasi Pagu Indikatif yang merupakan instrumen perencanaan anggaran (Prob T-statistic RBP = 0,00; RBB = 0,00). Selanjutnya berdasarkan uji F statistik variabel-variabel independen, yaitu RBP dan RBB secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Prob F-statistic = 0,00) (Renosa Tosca Zamaro, 2018).

Masih dalam penelitian yang sama, dengan menggunakan model lain yaitu model alokasi anggaran, berdasarkan uji T, variabel-variabel independen belanja alokasi anggaran dalam APBN satu tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Barang, berpengaruh terhadap alokasi Pagu Indikatif (Prob T-statistic RBP = 0,00; RBB = 0,00). Dengan menggunakan uji F statistik Belanja Pegawai dan Belanja Barang, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Prob F-statistic = 0,00).

Variabel-variabel alokasi anggaran dalam APBN satu tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan, yaitu alokasi anggaran belanja pegawai dan alokasi anggaran belanja barang operasional Kementerian Negara dan Lembaga dalam APBN dapat dipertimbangkan

menjadi model utama dalam proyeksi belanja operasional Kementerian Negara untuk menghitung Pagu Indikatif Kementerian Negara dan Lembaga. Hal tersebut karena secara statistik variabel-variabel pada model alokasi anggaran lebih baik dalam menjelaskan Pagu Indikatif dibandingkan dengan model realisasi belanja (Renosa Tosca Zamara, 2018).

Penelitian lainnya terkait pengaruh penyerapan anggaran atau realisasi anggaran dengan perencanaan APBN juga menunjukkan hasil yang selaras, dalam suatu studi terdapat pengaruh realisasi anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal terhadap penetapan pagu indikatif.

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Juwita Sari Winter, variabel Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (RABP) diukur dengan total realisasi belanja pegawai per tahunnya selama 4 (empat) Tahun yaitu dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, secara statistik menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Penetapan Pagu Indikatif dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.389. Tanda positif pada koefisien regresi menunjukkan bahwa dengan peningkatan yang efektif pada Realisasi Anggaran Belanja Pegawai akan meningkatkan Penetapan Pagu Indikatif. Variabel Realisasi Anggaran Belanja Barang (RABB) diukur dengan jumlah realisasi belanja barang per tahunnya selama 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Penetapan Pagu Indikatif dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.346. Tanda positif pada koefisien regresi mengindikasikan bahwa dengan peningkatan yang efektif pada Realisasi Anggaran Belanja Barang akan meningkatkan Penetapan Pagu Indikatif. Selanjutnya, variabel Realisasi Anggaran Belanja Modal (RABM) juga diukur dengan jumlah realisasi belanja modal per tahunnya selama 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Penetapan Pagu Indikatif dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.089. Tanda positif pada koefisien regresi menunjukkan bahwa dengan peningkatan yang efektif pada Realisasi Anggaran Belanja Modal juga akan meningkatkan Penetapan Pagu Indikatif. Berdasarkan uji F apabila diuji secara bersama-sama, variabel RABP, RABB, RABM, berpengaruh signifikan terhadap Penetapan Pagu Indikatif.

Penyerapan Anggaran berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Aditya Ahmad fathony, Siti Nurhayati, 2020)

## **2. Pengaruh Pendapatan Pajak terhadap Perencanaan APBN.**

Berdasarkan penelitian Muhammad Hamdan Sayadi (2020), realisasi pendapatan dari sektor perpajakan tahun 2020 tumbuh negatif 19,67% atau terjadi penurunan realisasi sebesar Rp262,08 triliun, apabila diperbandingkan dengan tahun 2019 pada periode yang sama. Penurunan kinerja pendapatan pajak ini direspon pemerintah dengan menurunkan target perencanaan pendapatan APBN melalui Undang-undang No Tahun 2019 tentang APBN yang kemudian telah direvisi sebanyak dua kali melalui Perpres No 54 dan 72 Tahun 2020.

Menurut hasil penelitian Abdullah dan Nazry (2014) dalam artikel Lilis Susanti (2016) bahwa *under-estimated* untuk pendapatan akan menghasilkan varian atau selisih antara anggaran dan realisasi. Varian yang besar mencerminkan ketidakakuratan dalam menentukan besaran anggaran. Hal ini diperkuat oleh penelitian Galinski (2013) yang berpendapat bahwa ketidakakuratan proyeksi anggaran dipengaruhi oleh sistem penyerapan dana Uni Eropa, yang dipengaruhi baik dari pendapatan pajak dan belanja modal. Dalam konteks perencanaan anggaran untuk lingkup negara (APBN), proyeksi akan menunjukkan tujuan penting dalam proses anggaran. Mereka menunjukkan kesehatan fiskal negara dan memberikan asumsi yang dapat digunakan untuk membantu mengevaluasi kebijakan pajak dan pengeluaran (Penner, 2001).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (2020) seiring dengan Pandemi COVID-19 berpengaruh pada

perekonomian global dan domestik mengakibatkan pelambatan perekonomian. Hal tersebut mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak dan non pajak. Akibatnya, Pemerintah harus merubah postur APBN melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2020 kemudian diubah kembali melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Perubahan disini berarti perubahan perencanaan APBN yang telah ditetapkan sebelumnya pada UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 kemudian di revisi oleh Peraturan Presiden.

Penelitian Sriyana (2009) dengan menggunakan pendekatan model VECM (*vector error correction model*), pendekatan VECM digunakan untuk melihat analisis jangka panjang dan pendek antara variabel yang ada, dalam hal ini hubungan antar penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah atau APBN, pada hasil penelitian terlihat menunjukkan keseimbangan anggaran jangka panjang antara pajak dan APBN dengan kata lain hubungan pendapatan pajak dengan belanja pemerintah di APBN memperlihatkan kausalitas searah, dimana penerimaan pajak selalu di ikuti dengan peningkatan belanja pemerintah atau naiknya anggaran APBN. Perubahan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah menyesuaikan ke arah yang sama dengan periode sebelumnya. Koefisien yang diperkirakan dalam kasus persamaan penerimaan pajak relatif kecil (0,068), menunjukkan bahwa sekitar 6,8% dari disequilibrium anggaran dikoreksi dalam satu tahun. Di bawah asumsi ini, persamaan pengeluaran pemerintah juga menunjukkan bahwa ia bergerak dari ketidaksetimbangannya. Dengan koefisien estimasi ECT sebesar 0,056, hal ini menunjukkan bahwa sekitar 5,6% dari *disequilibrium* pengeluaran pemerintah dikoreksi setiap tahun, dengan kata lain pemerintah tiap tahun selalu menyesuaikan APBN dalam pelaksanaannya sesuai dengan penerimaan pajak yang diperoleh.

Dengan menggunakan data pajak dan belanja negara tahunan dari tahun 1980-2016 dari tiap-tiap negara anggota G7 temel gurdal, mucahit aydin, Veysel Inal (2020) mengungkapkan bahwa ada hubungan positif dari kebijakan perpajakan yang ditempuh oleh negara-negara G7 tentang pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah, hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa kebijakan perpajakan mereka sejalan dengan tujuan financial mereka. Kebijakan perpajakan yang akan dilaksanakan atas dasar konjungtur ekonomi negara-negara adalah alat financial yang kuat, dengan potensi untuk melayani tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Penelitian ini menggunakan 4 metode dimana metode pertama peneliti melakukan *cross sectional dependence test* kemudian *unit root test*, *cointegration test* dan terakhir menggunakan *time domain causality* dan membandingkannya dengan *frequency domain causality*. Dari hasil pengujian tersebut terkait dengan pajak dan belanja pemerintah terdapat hubungan kausalitas jangka panjang searah antara pajak dan belanja negara

Pendapatan Pajak berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Roselyne Mkanjala, 2017), (Agus jamaludin, Toto widiarto 2018).

### **3. Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Perencanaan APBN**

Kebijakan fiskal merupakan suatu komponen kebijakan publik, yang merupakan tindakan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran uang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Perencanaan APBN dimulai dari pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Sejak Indonesia dilanda pandemi pada bulan Maret tahun 2020, kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal memainkan peran yang sangat penting dalam menangani guncangan hebat dan dampaknya yang multidimensi, kompleks dan luar biasa nasional (Sri Mulyani, 2022). Peran APBN sebagai instrumen

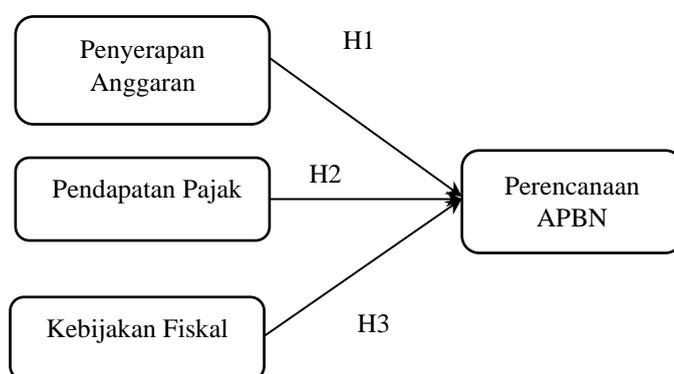
kebijakan fiskal sangat fundamental dalam upaya pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi.

Dalam kajian Badan Kebijakan Fiskal (2013) kondisi fiskal yang berkesinambungan akan terpenuhi apabila pemerintah melakukan kebijakan fiskal dengan mempersempit jarak asumsi ekonomi makro dalam perencanaan APBN disesuaikan dengan realita yang ada, tetap menstabilkan nilai *primary balance* tetap positif yang diharapkan dapat memenuhi anggaran untuk pembayaran cicilan dan bunga utang. Selain itu pemerintah dapat mengendalikan *mandatory dan nondiscretionary spending* dengan tujuan melebarkan ruang fiskal, dan terakhir adalah Pemerintah atas persetujuan DPR diberikan kewenangan dalam *fiscal flexibility* terutama dalam menghadapi kondisi-kondisi *urgent* dan tidak dapat di prediksi.

Hasna Azizah Syadza et al (2021) pernah melakukan analisis terkait implementasi kebijakan fiskal terhadap APBN yang telah dilaksanakan pemerintah. Penelitian tersebut, menggunakan teori IS LM dalam menilai/menganalisis kebijakan yang diambil pemerintah. Hasil analisis membuktikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil pemerintah berkesesuaian dengan teori *investment-savings (IS) dan liquidity preference-money supply (LM)*. Dampak kebijakan fiskal dengan menambah proporsi belanja diharapkan menjadi stimulus untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap perencanaan anggaran juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Parmadi P, 2011), (Wasiaturrahma, 2013), dan (Abdul Aziz, 2013).

### Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan hasil penelitian sebelumnya yang kongruen serta bahasan pengaruh antar variabel, maka dapat dirumuskan kerangka berfikir adalah sebagai berikut.



Sumber: Gambar riset

**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka: Penyerapan Anggaran, Pendapatan Pajak, dan Kebijakan Fiskal berpengaruh terhadap Perencanaan APBN. Dapat digarisbawahi bahwa perencanaan APBN mencakup keseluruhan proses penyusunan APBN dalam konteks satu siklus yang mencakup perencanaan pendapatan serta perencanaan belanja pemerintah dalam satu negara.

Selain dari tiga variabel ini yang mempengaruhi Perencanaan Anggaran, terdapat variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya:

- a) Pertumbuhan Ekonomi: (Ashabul Jamil, 2021), (Syamfitri Nur Cahyani et al, 2021), dan (Eri Supardjan et al, 2018).
- b) Realisasi Penerimaan PNB: Muhammad Hamdan Sayadi (2020).
- c) Alokasi Anggaran Belanja (T-1) atau 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran APBN yang direncanakan: Renosa Tosca Zamaro (2018)

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan teori, artikel yang relevan, serta pembahasan, maka dapat dirumuskan bahwa:

1. Penyerapan Anggaran berpengaruh terhadap Perencanaan APBN.
2. Pendapatan Pajak berpengaruh terhadap Perencanaan APBN.
3. Kebijakan Fiskal berpengaruh terhadap Perencanaan APBN.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran bahwa masih terdapat faktor lain yang dapat memberi pengaruh pada perencanaan APBN, selain variabel penyerapan anggaran, pendapatan pajak, dan kebijakan fiskal. Oleh karena itu, masih dibutuhkan kajian lebih mendalam untuk mencari faktor-faktor lainnya apa saja yang dapat memengaruhi perencanaan APBN selain yang variabel yang diulas pada artikel ini. Faktor lain tersebut seperti pertumbuhan ekonomi, realisasi penerimaan PNBPN, dan alokasi anggaran (T-1).

## BIBLIOGRAPHY

- Abdul Aziz (2013). Menjaga APBN agar Tetap Sustain. Buletin Info Risiko Fiskal (IRF) Edisi I Tahun 2013.
- Adwin Surya Atmadja (2000). Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Perkembangan Dan Dampaknya Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra. <http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/>.
- Agus Jamaludin, Toto Widiarto (2018). Pengaruh Penerimaan PBB Terhadap APBN.
- Akhadi Imam (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Variabel Pendapatan Perkapita Dan Angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat. doi: [10.31092/jpi.v6i1.1548](https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1548).
- Ashabul Jamil (2021). Analisis Pengaruh APBN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Banda Aceh Universitas Syiah Kuala; Tesis.
- Badan Pemeriksa Keuangan (2020). Laporan Hasil Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020. Republik Indonesia.
- Ery Supardjan, Sri Mintarti, Siti Amalia (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia Kabupaten Berau. <http://dx.doi.org/10.29264/jiem.v3i1.6377/>.
- Fauziah Aqmarina, Imahda Khoiri Furqon, 2020. Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Finansia Vol. 03, No. 02, Juli - Desember 2020
- Ferdinan, Isnurhadi, Marlina Widiyanti, Mohamad Adam (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. doi: <https://doi.org/10.29259/jmbt.v17i2.11844>.
- Jaka Sriyana (2009). A Causality Relationship Between Tax Revenue and Government Expenditure In Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets* August 2009 1 (2) 93-101
- Kuncoro, M. (2013). Mudah Memahami Dan Menganalisis Indikator Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuntadi, C., Retnoningsih, A. I., & Finlandia, D. A. (2022). Literature Review: Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset Dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Aset. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(4), 414-425.

- Kuntadi, C., Wahyuni, K.I., Mansawan, C.M (2022). Literature Review: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penganggaran Pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(6), 561-569
- Titin Delia, Syahril Djaddang, Suratno, Jmv. Mulyadi (2021). Analisis Determinasi Penyerapan Anggaran Dengan Perencanaan Anggaran Dan Politik Anggaran Sebagai Pemoderasi. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i1.77>.
- Khainurrofik, Model Makro Ekonomi Untuk Analisa Kesenambungan Dan Kerentanan Fiskal, Kementerian Keuangan: 2009.
- Lilis Susanti (2016). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kesalahan Proyeksi Anggaran dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. <http://Repository.Stieykpn.Ac.Id/261/1/Jurnal%20lilis%20susanti%20-%20121400419.Pdf>.
- Parmadi (2011). Suatu Deskripsi Tentang Penerimaan Pajak dalam Negeri Indonesia Periode 1990 – 2007.
- Syamfitri Nur Cahyani, Vivi Safitri, Yulizar Tri Nanda. Pengaruh APBN Kebijakan Fiskal Hutang Dalam Pertumbuhan Ekonomi Dimasa Pandemi. <https://doi.org/10.24042/slm.v2i2.1019>
- Temel Gurdal, Mucahit Aydin Dan Veysel Inal (2020). *The Relationship Between Tax Revenue, Government Expenditure, And Economic Growth In G7 Countries: New Evidence From Time And Frequency Domain Approaches. Economic Change And Restructuring* <https://doi.org/10.1007/s10644-020-09280-x>.
- Tulis S. Meliala Dan Francisca Widiyanti Oetomo (2008). Perpajakan Dan Akuntansi Pajak, (Jakarta: Semesta Media, 2008), H. 4.
- Titin Delia, Syahril Djaddang, Suratno, JMV. Mulyadi (2021). Analisis Determinasi Penyerapan Anggaran Dengan Perencanaan Anggaran Dan Politik Anggaran Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* Vol. 4(1), 2021, Halaman 116 – 131.
- Wasiaturrahma (2013). Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Penerimaan Negara Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jeb*, Vol. 7, No. 2, Juli 2013: 91-99.
- Winter, Juwita Sari (2015). Pengaruh Realisasi Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Terhadap Penetapan Pagu Indikatif Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai. *Scholars Bulletin*. <https://doi.org/10.36348/sb.2019.v05i09.006>.
- Zamaro Renosa Tosca (2018). Analisis Penghitungan Proyeksi Belanja Operasional Kementerian Negara dan Lembaga Untuk Penyusunan Pagu Indikatif. <https://doi.org/10.33827/akurasi2018.vol2.iss2.art11>.  
<https://bcbatam.beacukai.go.id/apbn-2023-antisipatif-dan-responsif-di-tengah-transisi-menuju-kehidupan-pascapandemi-yang-lebih-baik/>